

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini dibahas mengenai latar belakang dilakukannya penelitian tentang pengaruh dari struktur *good corporate governance* seperti independensi dewan komisaris, kepemilikan *blockholder*, kepemilikan direksi, dan frekuensi rapat komite audit terhadap *financial distress* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, pada bab ini juga akan dibahas mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang disajikan sebagai berikut.

### 1.1 Latar Belakang

Serangkaian praktik kecurangan dialami oleh perusahaan besar di Australia seperti *HIH Insurance Company* dan *One Tel and Harris Scarfe* menyebabkan perusahaan tersebut bangkrut. Akibat dari peristiwa bangkrutnya perusahaan tersebut menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pemegang saham dan lebih lanjut menjadikan menurunnya kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan (Miglani, *et al.* 2015).

Dampak negatif dari peristiwa bangkrutnya beberapa perusahaan besar tentu saja menimbulkan berbagai keprihatinan mengenai pelaksanaan praktik *good corporate governance*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan *good corporate governance* yang buruk dan mengalami kegagalan dalam penerapannya sehingga berakibat pada munculnya berbagai perilaku curang yang

yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan dan menyebabkan perusahaan mengalami kondisi *financial distress*.

Adanya peristiwa bangkrutnya perusahaan besar juga terjadi di Amerika Serikat yaitu pada perusahaan *Enron* dan *World-Com*. Hal serupa juga terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1999 akibat adanya krisis ekonomi dan moneter banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami kebangkrutan (Pedoman Umum GCG, 2006). Dari beberapa peristiwa bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar, muncul perdebatan tentang praktik *Good Corporate Governance*. Perdebatan mengenai praktik *Good Corporate Governance*, menghasilkan suatu keputusan mengenai peraturan atau pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Dari beberapa peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pentingnya penerapan *good corporate governance* yang baik dan berkelanjutan dalam menjaga eksistensi perusahaan.

Sejak tahun 1997 terjadi krisis berkepanjangan yang melanda Indonesia menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Sebagaimana dikemukakan Baird (dalam Tri, B. 2009) bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *good corporate governance* di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki oleh swasta.

Di Indonesia, konsep *good corporate governance* secara resmi diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 1999 melalui pembentukan Komite

Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) dengan mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang pertama. Menurut FCGI, 2002 (*Forum For Corporate Governance In Indonesia*) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Isu *good corporate governance* dilatarbelakangi adanya teori agensi (Berle dan Means dalam Fachrudin, 2008). Teori agensi adalah teori yang menjelaskan perilaku agen. Dalam teori ini terdapat dua pihak yang dapat diidentifikasi, yaitu *principal* dan *agent*. Menurut Hendriksen dan Van Breda (1991), *principal* adalah pihak yang menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal tersebut, *principal* mendelegasikan wewenang kepada agen dalam membuat suatu keputusan. Sedangkan *agent* adalah pihak yang menerima sumber daya dari *principal* untuk dikelola bagi kepentingan *principal*.

Dalam teori agensi, manajer (*agent*) diberi tanggung jawab oleh pemilik (*principal*) untuk mengelola dan mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik. Menurut Ang, *et al.* (2000), kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan tidak selalu selaras dikarenakan terjadi perbedaan kepentingan diantara keduanya. Sehubungan dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan suatu biaya yang dikenal dengan biaya agensi (*agency cost*). Manajer cenderung mengutamakan fasilitas kerja yang diperoleh, melalaikan tanggung jawab, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan

mengabaikan kepentingan pemilik sehingga mengurangi kesejahteraan pemilik perusahaan.

Praktik *good corporate governance* juga harus diterapkan dalam perusahaan agar perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer dapat selaras. Peran *good corporate governance* sangat penting sebagai mekanisme pengawasan yang efektif dan diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau mengurangi biaya agensi. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa dengan penerapan struktur *good corporate governance* mengurangi tingkat biaya agensi perusahaan.

Sehubungan dengan biaya agensi, apabila terjadi pengeluaran biaya agensi yang besar maka akan menimbulkan kekhawatiran mengenai sejauh mana keefektifan pengawasan dan mekanisme insentif (Miglani, *et al.* 2015). Terdapat dua cara utama untuk menangani masalah perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik yaitu dengan sistem pemantauan dan kontrak insentif. Kontrak insentif merupakan kontrak yang memperbolehkan manajemen untuk memperoleh bagian dari kekayaan perusahaan ketika nilai perusahaan meningkat. Dengan demikian manajer bekerja sesuai dengan keinginan pemilik dan perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer dapat diselaraskan sehingga biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan dapat ditekan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan struktur *good corporate governance* berhubungan dengan rendahnya biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan. Perusahaan yang secara konsisten menerapkan struktur *good corporate governance* cenderung mengeluarkan biaya agensi yang

lebih sedikit dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkan struktur *good corporate governance*. Menurut Miglani, *et al.* (2015), perusahaan yang pengeluaran biaya agensinya lebih rendah maka kemungkinan kecil mengalami *financial distress*. Dengan demikian, maka perusahaan yang menerapkan struktur *good corporate governance* secara menyeluruh dan konsisten harus berhubungan negatif dengan kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*.

Menurut Miglani, *et al.* (2015) perusahaan yang mengalami *financial distress* merupakan perusahaan yang mengalami *negative net income* atau rugi bersih selama lima tahun berturut-turut. Kriteria yang digunakan Miglani, *et al.* (2015) memiliki keterbatasan dalam menentukan perusahaan yang mengalami *financial distress*. Terdapat kecenderungan bahwa *postive net income* bisa dimanipulasi menjadi *negative net income*. Misalnya, seorang manajer mungkin akan mengurangi laba yang dilaporkan ketika sedang bernegosiasi dengan calon karyawan. Disisi lain, perusahaan lebih mungkin untuk meningkatkan laba daripada menurunkannya melalui manajemen laba. Namun faktanya, perusahaan mengalami kerugian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Miglani *et al.* menentukan kriteria perusahaan yang mengalami *financial distress* adalah perusahaan yang mengalami *negative net income* selama lima tahun berturut-turut.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian serta uraian mengenai peran struktur *good corporate governance*, mengindikasikan bahwa dengan adanya penerapan struktur *good corporate governance* diharapkan perusahaan akan memiliki tingkat kemungkinan penghindaran *financial distress* yang lebih rendah.

Melalui penelitian ini akan diuji pengaruh independensi dewan komisaris, kepemilikan *blockholder*, kepemilikan direksi, dan frekuensi rapat komite audit sebagai struktur *good corporate governance* terhadap penghindaran *financial distress*. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2015 yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH STRUKTUR GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Pelaksanaan *good corporate governance* merupakan sebagai suatu bentuk mekanisme pengawasan yang dapat mengontrol tindakan para pengelola perusahaan agar tidak bertindak menyimpang. Hal itu pada akhirnya dapat menghindarkan perusahaan dari *financial distress*. Karakteristik *good corporate governance* seperti independensi dewan komisaris, kepemilikan *blockholder*, kepemilikan direksi, dan frekuensi rapat komite audit termasuk pihak yang berperan dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Oleh karena itu karakteristik tersebut juga dapat mempengaruhi kemungkinan penghindaran *financial distress* pada perusahaan

Menurut Miglani, *et al.* (2015), perusahaan yang menerapkan struktur *good corporate governance* secara menyeluruh dan konsisten harus berhubungan negatif dengan kemungkinan kesulitan keuangan. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk menguji pengaruh struktur *good corporate governance* terhadap penghindaran *financial distress* pada perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas mengenai hubungan antara struktur *good corporate governance* terhadap penghindaran *financial distress* oleh perusahaan, maka secara spesifik, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi dewan berpengaruh terhadap penghindaran *financial distress*?
2. Apakah kepemilikan *blockholder* berpengaruh terhadap penghindaran *financial distress*?
3. Apakah kepemilikan direksi berpengaruh terhadap penghindaran *financial distress*?
4. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap penghindaran *financial distress*?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh independensi dewan terhadap penghindaran *financial distress*.
2. Menganalisis pengaruh kepemilikan *blockholder* terhadap penghindaran *financial distress*.
3. Menganalisis pengaruh kepemilikan direksi terhadap penghindaran *financial distress*.

4. Menganalisis pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap penghindaran *financial distress*.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan sebagai hasil informasi dari berjalannya praktek *good corporate governance* terhadap penghindaran *financial distress* guna merumuskan kebijakan lebih lanjut mengenai penerapan *good corporate governance* dalam mencegah terjadinya kondisi *financial distress* pada perusahaan.

2. Bagi pembaca dan peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian teoritis dan referensi di dalam menambah wawasan maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II           TELAAH PUSTAKA**

Bab ini mengkaji landasan teori dan penelitian terdahulu, menggambarkan kerangka pemikiran dan memaparkan hipotesis yang akan diuji.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dibahas variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

### **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil statistik.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan dibahas mengenai simpulan dan keterbatasan penelitian yang dilakukan serta saran untuk penelitian selanjutnya.

